

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory*

Penggunaan teori keagenan telah dipergunakan secara luas baik di sektor privat maupun sektor publik. Faria & Silva (2013) “Para ekonom menggunakan struktur hubungan prinsipal dan agen untuk menganalisis hubungan antara perusahaan dengan pekerja”. Dalam teori keagenan, Jensen dan Meckling (Jensen, 1976: 305 dalam Destriana, 2015: 127) mendefinisikan;

Hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih (*principal*) menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Konflik kepentingan akan muncul dari pendelegasian tugas yang diberikan kepada agen dimana agen tidak dalam kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan principal, tetapi mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemilik.

Dalam konteks organisasi sektor publik, Mardiasmo (2009: 20) menjelaskan;

Akuntabilitas sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas dalam konteks sektor publik mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai principal dan pemerintah sebagai *agent*.

Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial,

maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya.

2.1.2 Teori Stakeholder

Selain *agency theory*, teori lain yang mendasari penelitian ini ialah teori *stakeholder*. Istilah *stakeholder* pertama kali diperkenalkan oleh *Standford Research Institute* (RSI) pada tahun 1963 (Freeman, 1984). Freeman, 1984: Nurnberg, 2007: Syukron, 2015 mendefinikan “*stakeholder* sebagai *any group or individual who can affect or be affected by the achievement of an organization’s objective*. Bahwa *stakeholder* merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi”. Ardian dan Rahardja, (2013:2) menyatakan bahwa “*Stakeholder* merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan”. Dalam organisasi sektor publik, *stakeholder* sektor publik memiliki cakupan yang lebih luas dan lebih beragam.

2.1.3 Kualitas Informasi Laporan Keuangan

2.1.3.1 Laporan Keuangan

Pernyataan SAP No.1 menjelaskan definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan merupakan salah satu faktor yang menggambarkan kinerja suatu daerah. Pengungkapan Informasi akuntansi dalam laporan keuangan tahunan merupakan suatu komponen yang signifikan dalam mencapai sarana akuntabilitas publik. Alhamra & Hermiyetti, (2016: 445) “Perusahaan diharapkan lebih transparan dan akuntabel dalam pengungkapan informasi akuntansi yang ada dalam laporan keuangan menjadi dasar utama bagi para pengambil keputusan seperti investor, kreditor dan pengguna informasi lainnya”. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi

keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. PP Nomor 71 Tahun 2010 secara spesifik menjelaskan tujuan pelaporan keuangan yaitu:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan yang harus disusun oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Berdasarkan beberapa pengertian ini dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang dihasilkan oleh bidang ilmu akuntansi, yang telah dilakukan selama satu periode pembukuan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu instansi.

2.1.3.2 Kualitas Informasi

Informasi yang berkualitas adalah informasi yang mempunyai keakurasian, kecepatan dan kesesuaian dengan kebutuhan manajemen dan kelengkapan dari informasi yang dihasilkan (Susanto dalam Syaifullah, 2010).

Huang, et al. (1999): Lillrank (2003): Sukmaningrum (2015: 23) mendefinisikan 15 dimensi kualitas informasi yang dikelompokkan menjadi empat kelas, yaitu;

1. Kualitas intrinsik: akurasi, obyektivitas, believability, dan reputasi.
2. Kualitas aksesibilitas: akses dan keamanan.
3. Kualitas kontekstual: relevansi, nilai tambah, ketepatan waktu, kelengkapan dan jumlah data.
4. Kualitas representasi: interpretasi, kemudahan pemahaman, representasi ringkas, dan perwakilan konsisten.

Kualitas laporan keuangan merupakan persyaratan normatif yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan tersebut. Kualitas pelaporan keuangan adalah informasi yang lengkap dan transparan, dirancang tidak menyesatkan kepada pengguna. Informasi laporan keuangan dalam penelitian ini dikatakan berkualitas jika memenuhi karakteristik kualitatif laporan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki keuangan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan antara lain memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi

yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode Sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. dapat menyesatkan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan kualitas laporan keuangan adalah laporan mengenai posisi keuangan dan transaksi-

transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dengan memenuhi karakteristik kualitatifnya berupa relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

2.1.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan

2.1.4.1 Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan;

SPI sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu yang dijalankan oleh orang-orang dari setiap jenjang organisasi yang diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan antara pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi. Martini, Lianto, Hartati, Zulkifli, & Widyastuti (2019) menyebutkan;

Pengendalian internal merupakan sistem/prosedur yang ada dalam suatu organisasi untuk menjaga proses kegiatan operasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan guna pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Pengendalian internal berisi rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya". Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Karyawan merupakan unsur penting dalam setiap pengendalian intern. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, perusahaan mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. Pengendalian intern yang baik tidak akan dapat menghasilkan informasi keuangan yang andal jika dilaksanakan oleh karyawan yang tidak kompeten dan tidak jujur. Oleh karena itu perusahaan (instansi) perlu memiliki metode yang baik dalam menerima karyawan, mengembangkan kompetensi mereka, menilai prestasi dan memberikan kompensasi atas prestasi mereka. Selain itu faktor lain yang

membentuk lingkungan pengendalian suatu entitas yaitu pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab. Dengan pembagian wewenang yang jelas, organisasi akan dapat mengalokasikan berbagai sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan organisasi. Disamping itu, pembagian wewenang yang jelas akan memudahkan pertanggungjawaban konsumsi sumber daya organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Pada PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri atas beberapa unsur, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Unsur pengendalian intern yang kedua adalah penilaian risiko. Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan Instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Terhadap risiko yang telah diidentifikasi dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan Instansi Pemerintah merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan Instansi Pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko. Kegiatan pengendalian yang diterapkan dalam suatu Instansi Pemerintah dapat berbeda dengan yang diterapkan pada Instansi Pemerintah lain. Perbedaan penerapan ini antara lain disebabkan oleh perbedaan visi, misi, dan tujuan, lingkungan dan cara beroperasi, tingkat kerumitan organisasi, sejarah atau latar belakang serta budaya, dan risiko yang dihadapi.

4. Informasi dan Komunikasi

Instansi Pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun nonkeuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal serta internal. Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan lainnya di seluruh Instansi Pemerintah yang memerlukannya dalam bentuk serta dalam kerangka waktu, yang memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan pengendalian intern dan tanggung jawab operasional.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan SPI dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan berkelanjutan 17 diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas SPI yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern.

Mahmudi (2007) menyebutkan komponen penting yang terkait dengan pengendalian intern akuntansi antara lain sebagai berikut:

1. Sistem dan prosedur akuntansi. Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi (Pasal 98 PP Nomor 58 tahun 2005): (1) sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas; (2) sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas; (3) sistem dan prosedur akuntansi aset; dan (4) sistem dan prosedur akuntansi selain kas.
2. Otorisasi. Otorisasi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah sangat penting karena tanpa sistem otorisasi yang baik, maka keuangan daerah sangat berisiko untuk terjadi kebocoran. Sistem otorisasi menunjukkan ketentuan tentang orang atau pejabat yang bertanggung jawab mengotorisasi suatu transaksi yang terjadi di pemerintah daerah. Otorisasi tersebut bisa berbentuk kewenangan dalam memberikan tanda tangan pada formulir dan dokumen tertentu. Tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang maka transaksi tidak dapat dilakukan, atau walaupun ada transaksi tanpa otorisasi maka transaksi tersebut dikategorikan tidak sah atau ilegal.
3. Formulir, dokumen, dan catatan. Setiap transaksi yang terjadi di pemerintah daerah harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah. Selain terdapat bukti yang valid dan sah, transaksi tersebut harus dicatat dalam buku catatan akuntansi. Kelengkapan formulir dan dokumen transaksi serta catatan akuntansi sangat penting dalam proses audit keuangan.

4. Pemisahan tugas. Fungsi-fungsi atau pihak-pihak yang terkait dalam suatu transaksi dalam suatu transaksi harus dipisahkan. Suatu transaksi dari awal hingga akhir tidak boleh ditangani oleh satu fungsi atau satu orang saja. Harus dipisahkan antara fungsi pencatat uang serta pengotorisasi. Harus dilakukan pemisahan tugas secara tegas dengan deskripsi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas dalam rangka menghindari terjadinya kolusi, kecurangan, dan korupsi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan SPI adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi dengan memiliki beberapa unsur untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan negara.

2.1.4.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Organisasi adalah sebuah unit sosial yang dikoordinasikan secara sadar, terdiri atas dua orang atau lebih dan yang relatif terus-menerus guna mencapai satu atau serangkaian tujuan bersama (Robbins & Judge, 2008: 5). Prestasi kerja suatu instansi tergantung dari kemampuan pegawai yang bekerja dalam organisasi tersebut. Robbin & Judge (2008: 301) “Seseorang dengan tingkat kepuasan yang tinggi akan menunjukkan sikap yang positif terhadap pekerjaannya, sedangkan seseorang yang tidak puas dengan pekerjaannya akan menunjukkan sikap yang negatif terhadap pekerjaan”. Sikap negatif terhadap pekerjaan tentunya akan berpengaruh tidak baik terhadap prestasi organisasi. Oleh karena itu, agar seseorang selalu bersikap positif terhadap pekerjaannya, individu tersebut membutuhkan kepuasan yang tinggi terhadap pekerjaan. Kepuasan atau keberhasilan dalam pekerjaan sangat dipengaruhi oleh kompetensi individu dalam bidang pekerjaannya.

Organisasi dapat berprestasi unggul apabila orang-orang yang bekerja dalam organisasi dapat memberikan kontribusi maksimal kepada organisasi sesuai dengan tugas dan kemampuannya (Hutapea & Thoha, 2008: 64). Lebih lanjut, faktor yang menentukan keunggulan prestasi yaitu memiliki kompetensi yang

tepat, yang mana kompetensi ini dapat dimiliki oleh organisasi apabila organisasi tersebut memiliki fondasi yang kuat, yang tercermin pada seluruh proses yang terjadi dalam organisasi. Tentunya hal ini harus didukung oleh pemilikan kompetensi individu yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan individu tersebut. Spencer (1993) menyebutkan bahwa;

Kompetensi dapat didefinisikan sebagai karakteristik yang mendasari seseorang yang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab-akibat dengan kriteria yang diajukan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu (*A competency is an underlying characteristic of an individual that is causally related to criterion referenced effective and or superior performance in a job or situation*).

Kemudian, ia juga mengatakan bahwa kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu. Dengan demikian kompetensi dapat disimpulkan bahwa suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut. Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 7 (2013) menyebutkan ada tiga komponen utama pembentuk kompetensi, yaitu:

1. Pengetahuan (*Knowledge*)

Pengetahuan merupakan informasi yang dimiliki oleh seseorang. Pengetahuan adalah komponen utama kompetensi yang mudah diperoleh dan mudah diidentifikasi. Pengetahuan lebih mudah dimiliki seseorang dan biasanya dapat diperoleh hanya dengan mendengar atau melihat, serta relatif lebih mudah dikembangkan.

2. Keterampilan (*Skill*)

Keterampilan merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan. Keterampilan merupakan komponen utama kedua yang mudah dimiliki oleh individu, yang harus dibuktikan kepemilikannya dengan menunjukkan kemampuannya dalam melakukan pekerjaan. Keterampilan lebih sukar dimiliki daripada pengetahuan. Namun, seseorang yang memiliki

keterampilan dengan sendirinya sudah memiliki pengetahuan atas pekerjaan yang mereka lakukan.

3. Perilaku (*Attitude*)

Perilaku merupakan suatu tindakan (*action*) sehingga kompetensi perilaku akan teridentifikasi apabila seseorang memeragakannya dalam melakukan pekerjaan. Secara umum, kompetensi perilaku lebih menekankan pada perilaku produktif yang harus dimiliki serta diperagakan oleh seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan agar dapat berprestasi luar biasa.

Agar suatu organisasi dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya, diperlukan kegiatan sumber daya manusia yang harus menyatu dengan pengelolaan organisasi tersebut. Wiley, 2002: Azhar, 2007: Asri, 2015 mendefinisikan “SDM merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut”. SDM yang berbasis kompetensi dapat meningkatkan kapasitas dan membangun pondasi, karena apabila orang-orang yang bekerja dalam organisasi memiliki kompetensi yang tepat sesuai dengan tuntutan pekerjaannya, orang-orang tersebut mampu baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun mental serta karakter produktifnya.

SDM merupakan elemen terpenting dari suatu organisasi agar organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya, oleh karena itu diperlukan pengelolaan sumber daya yang baik agar suatu organisasi memiliki pegawai yang berkompeten dan dapat berkontribusi secara optimal. Kompetensi sumber daya merupakan kapasitas seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pekerjaan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang cukup memadai. SDM yang berkompeten tentunya akan dengan mudah dapat memahami suatu pekerjaan dan mengatasi masalah yang dihadapi terkait dengan pekerjaan tersebut. Selain itu, kompetensi SDM yang sesuai dengan bidang pekerjaannya akan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau kegagalan dalam pekerjaan. Warisno (2009) dalam Kesuma dkk: (2014) “Kegagalan SDM pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah”. Darno (2012: 4) menyebutkan bahwa;

Latar belakang pendidikan mempunyai peran yang sangat penting karena dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan dalam proporsi tertentu diharapkan dapat memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh suatu pekerjaan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat. SDM yang berlatar belakang pendidikan akuntansi atau setidaknya memiliki pengalaman di bidang keuangan sangat dibutuhkan dalam suatu pekerjaan yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki SDM yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan (Sagara, 2015: 112). Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, SDM yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik.

2.1.4.3 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang, diterapkan dalam, menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PSAP, adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif.

Di dalam pasal 2, bahwa SAP dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dan di dalam pasal 3, PSAP sebagaimana dimakud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi (IPSAP) dan/atau Buletin Teknis SAP. IPSAP dan Buletin Teknis SAP juga disusun dan diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan diberitahukan kepada Pemerintah dan BPK serta rancangan IPSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 14 hari kerja sebelum IPSAP diterbitkan.

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan SAP dan merupakan acuan bagi KSAP, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam PSAP. Buletin Teknis SAP adalah informasi yang berisi penjelasan teknis akuntansi sebagai pedoman

bagi pengguna. Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi SAP Berbasis AkruaI dan SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI. SAP Berbasis AkruaI terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis AkruaI.

Berdasarkan pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP terdapat 12 PSAP yaitu;

1. PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan

Pernyataan standar ini memiliki tujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan dengan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebgaian besar pengguna laporan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basisi kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta basis akruaI untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas.

2. PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran

Tujuan standar LRA (Laporan realisasi anggaran) adalah menyediakan informasi mengenai realiasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing masing dibandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna untuk mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

3. PSAP No. 03 Laporan Arus Kas

Tujuan pernyataan standar LAK (Laporan arus kas) adalah mengatur penyajian arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan memgklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan

nonanggaran selama satu periode akuntansi. Pelaporan arus kas memiliki tujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

4. PSAP No. 04 Catatan atas Laporan Keuangan

Tujuan CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) untuk mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada CaLK. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat berpotensi mengandung kesalahpahaman informasi diantara pembacanya, sehingga dalam laporan keuangan dibuat CaLK yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

5. PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan

Pernyataan standar akuntansi persediaan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi persediaan dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

6. PSAP No 06 Akuntansi Investasi

Pernyataan standar akuntansi investasi untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan. Investasi pemerintah dibagi menjadi dua macam yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar dan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.

7. PSAP No 07 Akuntansi Aset Tetap

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap, yang meliputi klasifikasi, pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan yang diperlukan. Pernyataan standar ini mensyaratkan bahwa aset tetap dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam rangka keonseptual akuntansi pemerintahan.

8. PSAP No 08 Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaan

Tujuan pernyataan standar konstruksi dalam pengerjaan adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan dengan metode nilai historis. Pernyataan standar ini memberikan panduan untuk (a) indentifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai konstruksi pengerjaan; (b) penetapan besarnya biaya yang dapat dikapitalisasi dan disajikan dineraca; (c) penetapan berbasis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.

9. PSAP No 09 Akuntansi Kewajiban

Tujuan pernyataan standar akuntansi kewajiban untuk mengatur perlakuan akuntansi meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban. Kewajiban timbul karena adanya konsekuensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari tindakan masa lalu.

10. PSAP No 10 Koreksi Kesalahan

Tujuan pernyataan standar koreksi kesalahan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa. Laporan keuangan untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa suatu entitas harus disusun dan disajikan dengan menerapkan pernyataan standar ini.

11. PSAP No 11 Laporan Keuangan Konsolidasi

Tujuan pernyataan standar ini untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.

12. PSAP No 12 Laporan Operasional

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang terceminikan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Akuntansi Pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP. Tujuan dari Standar Akuntansi Pemerintahan adalah:

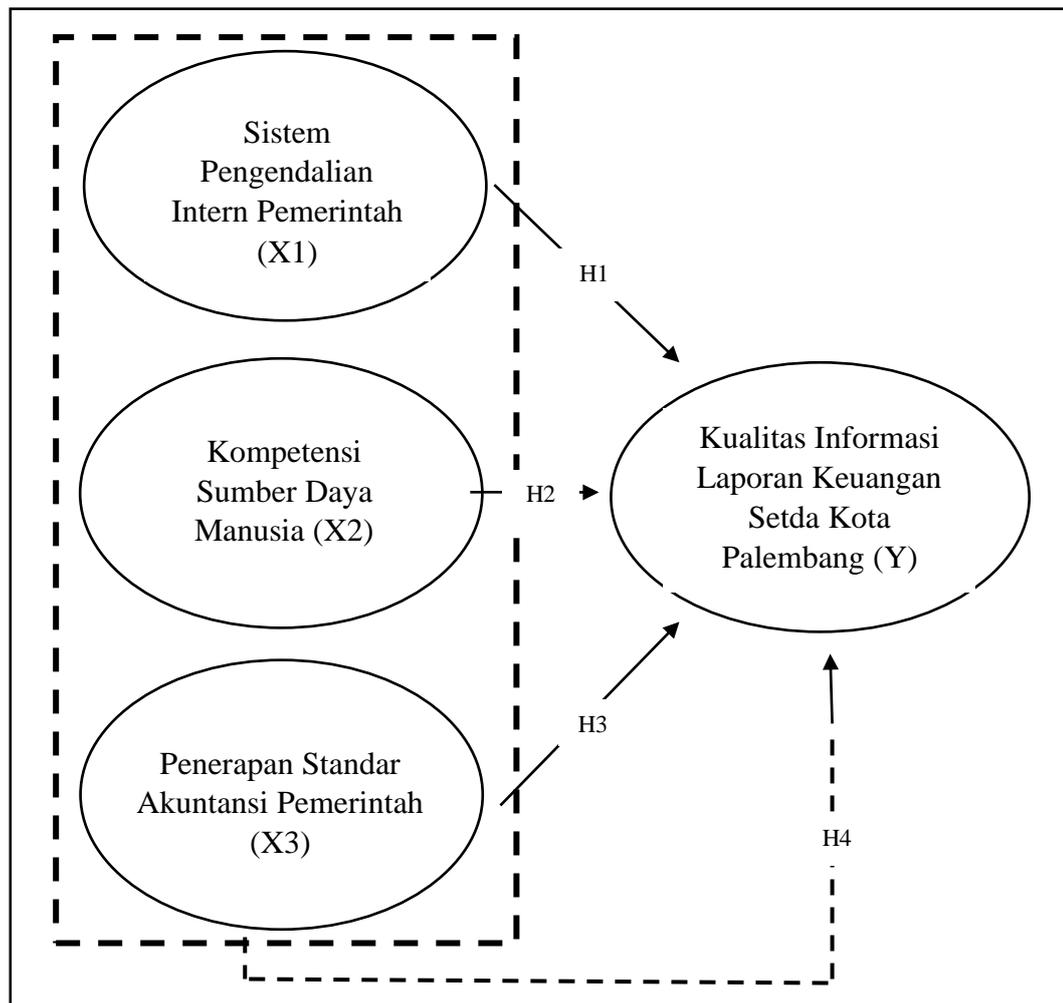
1. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
2. SAP disusun dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
3. SAP berlaku untuk pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

PP No 71 Tahun 2010 tentang SAP menjelaskan mengenai tujuan dari Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu “Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (penganggaran, akuntansi dan pelaporan), meningkatkan pengendalian fiskal, manajemen asset, meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah”.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa SAP adalah prinsip akuntansi yang diterapkan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang mempunyai kerangka konseptual dan dilaksanakan dengan jangka waktu serta mempunyai tujuan tertentu yaitu untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan, memudahkan fungsi perencanaan, menyediakan informasi yang terbuka, jujur dan menyeluruh.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel terikat yaitu kualitas informasi laporan keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Palembang dengan variabel bebas yaitu SPI, kompetensi SDM dan penerapan SAP. Hubungan variabel dalam penelitian ini diilustrasikan melalui kerangka konseptual, yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 2.1.



Sumber: Data diolah, 2021

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis

Keterangan:

—————▶ : Pengaruh secara parsial

-----▶ : Pengaruh sebagai simultan

H₁ : Hipotesis 1

H₂ : Hipotesis 2

H₃ : Hipotesis 3

H₄ : Hipotesis 4

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang

diteliti. Sugiyono (2017: 60) “Kerangka pemikiran adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yg telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”. Selanjutnya Suriasumantri (dalam Sugiyono, 2017: 60) “Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan”.

Dapat dilihat bahwa pengaruh SPI, kompetensi SDM dan penerapan SAP (variabel bebas) terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada Setda kota Palembang (variabel terikat). Dimana variabel bebas saling mempengaruhi satu sama lain antara SPI (X_1), kompetensi SDM (X_2) dan penerapan SAP (X_3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada Setda Kota Palembang (Y).

2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah telah banyak diteliti. Penelitian-penelitian terdahulu mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah diringkas dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Variabel	Kesimpulan
1	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Siti Qomah dan Ismunawan, 2021.	Independen: Penerapan SAP, SPI, Kompetensi SDM dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Devenden: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Penerapan SAP, dan SPI memberikan pengaruh secara signifikan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali. Sedangkan kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
2	Analisi faktor-	Victorinus Laoli,	Independen:	Kualitas SDM tidak

No	Judul	Penulis	Variabel	Kesimpulan
	faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan.	2018.	SDM, pemanfaatan teknologi informasi, SPI Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan.	berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pemanfaatan teknologi informasi dan SPI berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah. Kualitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan SPI saling mempengaruhi satu sama lain dan berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah, hal ini berarti secara simultan berpengaruh positif signifikan.
3	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.	I Putu Upabayu Rama Mahaputra dan I Wayan Putra, 2014.	Independen: Kapasitas SDM, Penerapan Sistem informasi keuangan daerah, SPI dan Implementasi standar akuntansi pemerintah. Dependen: Kualitas informasi pelaporan keuangan	Kapasitas SDM, sistem informasi keuangan daerah, SPI dan implementasi SAP berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi akuntansi pada kualitas informasi pelaporan keuangan di SKPD Kabupaten Gianyar.

No	Judul	Penulis	Variabel	Kesimpulan
4	Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Indra Suyoto Kurniawan, 2016.	Independen: Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan SPI Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan pengendalian intern belum mampu untuk memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
5	Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Nur Laila Yuliani, 2016.	Independen: Kompetensi SDM, Penerapan SAKD, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan SAP dan Pengendalian Intern. Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa penerapan SAKD dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan kompetensi SDM, penerapan SAP, dan pengendalian intern tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
6	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Harlinda, 2016.	Independen: SDM, teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi, Komitmen Organisasi, Pemahaman Akuntansi dan Faktor	SDM, teknologi informasi, Pengendalian intern akuntansi, Pemahaman akuntansi dan Faktor Eksternal berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Komitmen organisasi

No	Judul	Penulis	Variabel	Kesimpulan
	di Provinsi Riau)		Eksternal. Dependen: Kualitas Informasi Laporan Keuangan.	tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
7	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud).	Sintike Mentari Modo, David Paul Elia Saerang, Agus Tony Poputra, 2017.	Independen: Pengawasan Internal, Pemahaman Peraturan, Kapasitas SDM, Penggunaan Teknologi Informasi dan Komitmen Organisasi. DePenden: Kualitas Informasi Laporan Keuangan.	Pengawasan Internal, Kapasitas SDM, Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Sedangkan Pemahaman tentang Peraturan dan Penggunaan Teknologi Informasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan secara statistik terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

Sumber: Data diolah, 2021

Dalam penelitian ini, kualitas informasi laporan keuangan sebagai variabel dependen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dengan Sekretariat Daerah Kota Palembang yang menjadi objek dalam penelitian dan variabel independennya yaitu SPI, kompetensi SDM, dan penerapan SAP serta variabel dependennya Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh SPI terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Pengendalian intern yang digunakan dalam suatu entitas merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas. Berdasarkan PP RI No 60 Tahun 2008 tentang SPI bahwa;

SPI pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap perundang-undangan.

Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan. BPK (2016) menyebutkan “Hasil audit yang dilakukan oleh BPK, BPK memberikan opini “tidak wajar dan/atau disclaimer” diantaranya disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait”. Dengan SPI, risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan pemerintah daerah mengalami kekeliruan. Mahaputra &Wayan, 2014) menyebutkan;

SPI berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan. Suatu sistem yang berkualitas, dirancang, dibangun dan dapat bekerja dengan baik apabila bagian-bagian yang terintegrasi dengan sistem tersebut beroperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing- masing. Salah satu bagian di dalam sistem informasi akuntansi yang menunjang kelancaran kerja sistem informasi akuntansi tersebut adalah pengendalian internal (*internal control*).

Berdasarkan uraian di atas, maka hubungan antara SPI dengan kualitas informasi laporan keuangan daerah dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H₁: SPI berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Setda Kota Palembang.

2.4.2 Pengaruh Kompetensi SDM pada Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagai sebuah implementasi kebijakan publik dalam praktik, memerlukan kapasitas SDM yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi yang memadai), disamping pengembangan kapasitas organisasi (Insani, 2010). Penelitian mengenai kesiapan SDM dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan daerah pernah dilakukan oleh Nazier (2009) dalam Insani (2010) “Yang memberikan temuan empiris bahwa 76,77% unit pengelola keuangan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diisi oleh

pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sebagai pengetahuan dasar yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan”. Hal tersebut disebabkan oleh: (1) belum ada kebijakan rekrutmen pegawai berlatar belakang akuntansi; (2) walaupun SDM tersebut bukan berlatar belakang pendidikan akuntansi, akan tetapi mereka dianggap mampu menjalankan/melaksanakan tugas dengan modal diklat dan bimbingan; (3) adanya kebijakan pimpinan; dan (4) pihak manajemen telah mengajukan usulan tentang formasi personil yang dibutuhkan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, tetapi usulan formasi tersebut diubah/direvisi untuk disesuaikan dengan rencana strategi pemerintah pusat.

Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, kualitas informasi akuntansi akan menjadi buruk apabila SDM yang melaksanakannya tidak memiliki kompetensi yang memadai, selain itu juga SDM akan menemukan hambatan dalam menjalankan fungsinya (Lilis & Wikan, 2014). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu nilai informasi yang disyaratkan yaitu keandalan. Indriasari & Nahartyo (2008) menyebutkan

Apabila SDM tidak memiliki kompetensi yang disyaratkan, maka informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, salah satunya sebagaimana yang masih banyak ditemui dalam pelaporan keuangan pemerintah.

Selain itu, SDM yang kurang memiliki pemahaman terhadap tugas dan fungsinya serta banyak menemukan hambatan dalam pengolahan data juga akan berdampak pada penyajian laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas, maka hubungan antara kompetensi SDM dengan kualitas informasi laporan keuangan daerah dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H₂: Kompetensi SDM berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Setda Kota Palembang.

2.4.3 Pengaruh Penerapan SAP terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP;

SAP adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan, memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah, menyediakan informasi mengenai keuangan terbuka, jujur dan menyeluruh kepada *stakeholders*, serta menyediakan informasi yang berhubungan dengan kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran.

SAP berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan (Qomah & Ismunawan, 2021). SAP memberikan pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah karena mempunyai mempunyai rangkaian yang sistematis dan tujuan yang telah diatur sehingga jika SAP ini dipatuhi maka akan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dan berpengaruh negatif jika Standar Akuntansi Pemerintahan ini tidak dipatuhi.

Berdasarkan uraian di atas, maka hubungan antara penerapan SAP dengan kualitas informasi laporan keuangan daerah dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H₃: Penerapan SAP berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Setda Kota Palembang.

2.4.4 Pengaruh SPI, Kompetensi SDM, dan Penerapan SAP terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Hipotesis ini digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Priyatno, 2012: 137). Dalam hal ini ditunjukkan untuk mengetahui apakah variabel SPI, kompetensi SDM dan penerapan SAP berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Hubungan antara SPI, kompetensi SDM dan penerapan SAP dengan dengan kualitas informasi laporan keuangan daerah dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H₄: SPI, kompetensi SDM dan penerapan SAP secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Setda Kota Palembang.